

Analisis Kebijakan Rasionalisasi Apbd Terutama Pembangunan Infrastruktur Kota Surabaya Untuk Menanggulangi Covid-19

Eureka Ratna Nirmala¹, Bambang Kusbandrijo², Kendry Widiyanto³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: eurekarn23@gmail.com

Article History:

Received: 07 Januari 2022

Revised: 15 Januari 2022

Accepted: 15 Januari 2022

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Covid-19, Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Abstrak: Pemerintah Kota Surabaya merasionalisasi anggaran, salah satunya dari dana pembangunan infrastruktur non-strategis, untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Realokasi APBD tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu bernomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah kota Surabaya tentang dana infrastruktur yang telah direalokasikan. Penulis menggunakan metode kualitatif studi literatur dan memperoleh data berdasarkan berita yang valid. Pada penelitian kali ini ingin mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan Pemkot Surabaya akan membawa dampak apa saja, sehingga dapat menyimpulkan efektivitas dan efisiensinya. Pada implementasinya, kebijakan ini tidak dapat menyenangkan semua pihak, salah satunya menyebabkan pengangguran bagi pekerja konstruksi. Namun dengan adanya pengalihan dana infrastruktur kepenanggulangan pandemi ini Pemkot Surabaya bisa membeli hal-hal yang dapat menunjang penurunan jumlah kasus dan kesembuhan masyarakat yang terjangkit virus Covid-19. Penganggaran tersebut digunakan untuk pengadaan vaksinasi, sehingga dapat menciptakan herd immunity di masyarakat

PENDAHULUAN

Virus corona SARS-CoV-2, penyebab pandemi Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Beberapa pekan setelah itu, dengan cepat wabah Covid-19 menyebar dan topik corona mulai menjadi pembahasan di berbagai media seluruh dunia. World Health Organization (WHO) dan pemerintah di setiap negara berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir penularan dengan berbagai upaya. Hingga saat ini, penyebaran virus corona telah mengekskansi lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia.

Menurut laman infocovid19.jatimprov.go.id (diakses pada tanggal 1 Desember 2021), Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 399.405 kasus. Surabaya sebagai ibukota provinsi tersebut sebagai wilayah dengan kasus positif terbanyak. Jumlah total kasusnya saat ini naik sebesar 0,006% mencapai 66.949 kasus. Jumlah kasus yang fluktuatif naik-

turun, tetap harus diwaspadai karena virus Covid-19 belum dapat ditangani sepenuhnya. (lawancovid-19.surabaya.go.id)

Salah satu fokus pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2020 adalah pembangunan infrastruktur. Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya berencana melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) ruas Sememi ke Utara-Fly Over Teluk Lamong, dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) ruas Nambangan-Kedung Cowek. Serta pengadaan tanah dan pelebaran frontage road Wonokromo, pengadaan tanah dan pembangunan jalan akses menuju Gelora Bung Tomo, dan pengadaan tanah serta pembangunan jalan akses Lapangan Tembak, pengadaan tanah dan pembangunan Jembatan Gunungsari (Gajah Mada), pembangunan box culvert diversi Gunungsari, pembangunan Jembatan Joyoboyo, Jembatan Ngagel, dan Jembatan Undaan Wetan-Undaan Kulon. Tahun ini juga akan membangun pedestrian di 18 lokasi, dan pembangunan rumah pompa di dua lokasi, pengadaan pemasangan pompa air pada tujuh lokasi dan pengadaan alat berat. Semua proyek tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan yang anggarannya tahun 2020 mencapai Rp 1,3 triliun

Covid-19 merupakan virus yang penyebarannya cepat, dapat dilihat dari jumlah kasusnya pada data di atas. Serta tak terduga dan tak termasuk dalam rancangan anggaran tahun ini, Surabaya menganggarkan dana kesehatan untuk pengembangan fasilitas rumah sakit. Keterbatasan dana yang ada membuat pemerintah kota Surabaya menunda sejenak pembangunan-pembangunan yang tidak memiliki urgensi dan dapat direalokasikan, salah satunya berasal dari dana infrastruktur, kepenanggungan wabah ini agar tidak semakin menyebar.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu bernomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 yang berisi tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pembangunan infrastruktur dinilai tidak memiliki urgensi karena masyarakat saat ini tidak melakukan mobilitas tinggi sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu menghindari kerumunan, sehingga alokasi dana infrastruktur bisa dianggarkan lagi pada APBD tahun berikutnya. Juga mengingat pentingnya pembatasan fisik bagi para pekerja untuk mengurangi resiko tertular Covid-19.

Rasionalisasi anggaran secara umum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Rasionalisasi anggaran sendiri berarti melakukan Perubahan APBD yang mana menyesuaikan antara Pendapatan Daerah semester pertama dengan belanja daerah yang sudah dianggarkan pada tahun berkenaan. Anggaran yang telah ditetapkan disesuaikan kembali dengan pendapatan riil yang diterima berdasarkan hasil evaluasi Triwulan kedua. Surat Keputusan yang dibuat oleh Mendagri dan Menkeu berguna untuk memberikan arahan secara khusus atas realokasi anggaran yang lebih memiliki urgensi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah kota Surabaya tentang dana infrastruktur yang telah direalokasikan kepenanggungan wabah dari virus Covid-19, terutama pengadaan vaksin.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Menurut Hatch dan Farhady (1981), variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

a. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan pemkot Surabaya mengenai realokasi APBD 2020.

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah dampak-dampak; dan efektivitas dan efisiensi dari kebijakan tersebut.

Desain Penelitian

Menurut Fachruddin (2009) desain penelitian adalah kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut diberlakukan. Pada penelitian kali ini ingin mengetahui implementasi akan membawa dampak apa saja, sehingga dapat menyimpulkan efektivitas dan efisiensinya.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto tahun (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Adapun subjek penelitian yang diteliti adalah pemerintah kota Surabaya dengan kebijakan realokasi anggarannya.

Teknik Pengumpulan Data

Bungin (2003: 42), menjelaskan metode pengumpulan data adalah “Dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan credible”. Sementara, Arikunto (2002:136), berpendapat bahwa “metode penelitian adalah berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mereview dan mengkontruksi sumber-sumber dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2000: 103) merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Bertumpu pada konsep ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif studi literatur, yakni melakukan analisis dan mendeskripsikan secara kualitatif dan mencari dan memberi makna atas data hasil temuan lapangan sesuai dengan teori dan konsep yang dipijak sesuai studi literatur yang menjadi acuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah kasus yang semakin bertambah hingga menyebabkan Jawa Timur menempati posisi kedua dengan total kasus terbanyak di Indonesia dan Surabaya sebagai kasus terbanyak di provi mengharuskan pemerintah melakukan tindakan preventif agar dapat mengendalikan

penyebaran virus tersebut. Dan untuk mendukung adanya tindakan-tindakan selanjutnya yang dapat menunjang hal tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan pemerintah memiliki keterbatasan dana. Sehingga dibuat Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu bernomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 yang berisi tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pada tahun 2020 ketika realokasi anggaran awal, Surabaya sudah melakukan rasionalisasi untuk dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 196 miliar atau tepatnya Rp 196.408.341.686. Anggaran itu bersumber dari pos belanja tidak terduga Rp 12,5 miliar dan belanja langsung Rp 184 miliar. Anggaran ini untuk penanganan Covid-19 selama April dan Mei 2020. Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, penganggaran itu sudah melalui pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur dan juga berkonsultasi dengan pihak kejaksaan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan anggaran tersebut dialokasikan untuk dua bulan saja, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu bernomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020, akan menambah dana yang akan direalokasikan.

Realokasi di tahun 2021 yang terjadi pada pertengahan tahun, yaitu Juli, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) senilai Rp 200 miliar digunakan untuk anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Surabaya. Anggaran tersebut tidak dapat menutupi estimasi pengeluaran sebesar Rp 446 miliar yang diperkirakan hingga bulan Desember. Dalam wawancara di surabaya.liputan6.com, Sekda Kota Surabaya mengatakan bahwa dibutuhkan peran dari seluruh stakeholder dalam penanganan Covid-19.

Putra (2003) menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya memiliki empat elemen: penjabaran kebijakan ke dalam berbagai aktifitas pelaksanaan; pengorganisasian aparat/staf pelaksana; pengalokasian sumber-sumber untuk merealisasikan kegiatan; dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait di dalam dan di antara instansi pelaksana. Hill & Hupe (2002) mengemukakan bahwa dalam membicarakan implementasi maka secara implisit maupun eksplisit kita membuat penilaian, yakni membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diharapkan. Penilaian ini mengarah pada observasi tentang efektivitas implementasi, kekurangan implementasi, dan kegagalan implementasi.

Dalam surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu bernomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020, rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja salah satunya adalah sewa alat berat yang dapat berkesinambungan dengan poin berikutnya, yaitu belanja modal untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya. Dan untuk pembangunan proyek strategis tidak akan ditunda namun direkomendasikan untuk mengurangi volume pengerjaannya menjadi 50% karena keterbatasan sumberdaya, baik anggaran maupun tenaga kerja. Penundaan beberapa pembangunan infrastruktur tidak akan merugikan pemerintah sebab infrastruktur berpotensi tidak optimal. Jika infrastruktur dipaksakan di tengah penurunan produksi manufaktur dan daya beli masyarakat, maka utilitas pemanfaatan infrastruktur akan sangat rendah.

Infrastruktur yang ditunda penggarapannya juga mempertimbangkan pembatasan fisik antar pekerja agar tidak terjadi penularan. Penundaan tersebut juga memiliki dampak kepada para pengusaha serta pekerja konstruksi karena mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Namun, dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, menjelaskan penindaklanjutan Kontrak Penyelenggaraan Konstruksi sehingga pekerja yang terlibat dalam kontrak konstruksi tetap mendapatkan haknya berupa gaji.

Pengalihan dana, terutama dari infrastruktur non-strategis, menimbulkan dampak pengangguran karena pekerja konstruksi dirumahkan, meskipun tetap diberikan gaji sesuai dengan kontrak konstruksi. Namun, setelah dirumahkan para pekerja tersebut kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dan tidak memungkinkan bekerja dengan bidang yang sama karena dibutuhkan physical distancing untuk menekan penyebaran virus. Selain para pekerja, warung-warung yang biasanya berada di sekitar tempat proyek juga mengalami kesulitan berupa omzet yang menurun dikarenakan tidak ada konsumen, para pekerja, yang membeli dagangan mereka. Implementasi kebijakan ini memberikan dampak negatif ke beberapa sektor. Tapi di sisi lain memberikan dampak positif yang lebih besar karena lebih bermanfaat untuk mayoritas masyarakat dan mempercepat pulihnya Surabaya di berbagai sektor.

Dalam alokasi anggaran terdapat refocusing dan/atau perubahan yang dimaksud diarahkan kepada tiga hal, yaitu penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha di daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net. Sejak tahun 2020, seluruh realokasi anggaran tersebut digunakan untuk melakukan segala kegiatan maupun program yang mendukung pencegahan virus Covid-19. Di antaranya adalah pemberian APD dan masker kepada puluhan puskesmas dan rumah sakit, pembuatan bilik sterilisasi, pengadaan rapid tes, hingga penanganan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19. Setelah formulasi vaksin untuk melawan Covid-19 ditemukan, kini fokus Pemerintah Kota Surabaya adalah pengadaan vaksin yang disalurkan kepada seluruh lapisan masyarakat Surabaya dengan memprioritaskan tenaga kesehatan.

Menurut dashboard Kementerian Kesehatan, vaksinasi di Surabaya merupakan salah satu yang tertinggi secara nasional. Sejak bulan September telah mampu melampaui target vaksinasi dosis pertama. Vaksinasi dosis pertama telah mencapai 104,8% sebanyak 2.324.041 jiwa. Dosis kedua sudah diberikan kepada 1.477.681 jiwa atau berhasil mencapai 66.6% dari target. Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam wawancanya bersama Jawa Pos, percepatan vaksinasi tersebut berhasil berkat kolaborasi yang intensif dengan semua unsur forum pimpinan daerah. (Diakses di jawapos.com pada 1 Desember 2021)

Rasionalisasi APBD Surabaya non-urgensi yang terus berlanjut menyebabkan Surabaya memiliki anggaran lanjutan dari rasionalisasi anggaran yang pertama, sehingga bisa menjalankan vaksinasi dosis pertama dengan baik. Namun, seluruh rangkaian vaksinasi, termasuk dosis dua dan tiga, belum selesai didistribusikan kepada masyarakat Surabaya. Bahkan estimasi anggaran yang telah ditetapkan untuk melakukan segala kegiatan yang bertujuan untuk penanganan virus Covid-19, termasuk pengadaan vaksinasi, hingga bulan Desember masih mengalami kekurangan sebesar Rp 246 miliar. Percepatan vaksin menjadi upaya untuk menciptakan herd immunity, sehingga anggaran yang belum mencukupi harus diupayakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi Covid-19 yang belum usai menyebabkan Pemkot Surabaya harus melakukan program penanganan dan pencegahan penyebaran virus tersebut. Rasionalisasi dana penanganan Covid-19 dari APBD Kota Surabaya salah satunya berasal dari dana infrastruktur non-urgensi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu bernomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 yang berisi tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pada implementasinya, kebijakan ini dapat menyebabkan pengangguran bagi pekerja konstruksi. Namun, dana tersebut dapat dianggarkan kepengadaan hal-hal yang dapat menunjang penurunan jumlah kasus dan kesembuhan masyarakat yang terjangkit virus Covid-19. Salah

satunya pengadaan vaksinasi dosis pertama di Kota Surabaya dapat melebihi target berkat anggaran yang tersedia, meskipun dosis-dosis selanjutnya belum memenuhi target. Vaksinasi yang menciptakan herd immunity harus diberikan kepada seluruh masyarakat Surabaya agar dapat kembali menjalani kehidupan sebelum pandemi ini terjadi.

Kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum aman untuk dilaksanakan mengingat pandemi Covid-19 belum usai, sehingga anggaran tersebut dapat ditunda pengadaannya. Anggaran infrastruktur non-urgensi yang telah direalokasikan menyebabkan Pemerintah Kota Surabaya harus merealokasi dari anggaran yang lain karena berbagai anggaran yang telah direalokasi masih belum menutupi target belanja. Rasionalisasi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) merupakan salah satu yang bisa diupayakan, dengan cara menunda atau membatalkan kegiatan yang ada pada SKPD tersebut. Namun, jika kegiatan harus tetap dilaksanakan, maka dapat memilih akomodasi atau fasilitas dengan kelas dibawah standar biasanya agar anggaran dapat lebih ditekan dan dipergunakan untuk menambah anggaran belanja penanggulangan Covid-19.

DAFTAR REFERENSI

- Azhari, Ilham. 2020. Pengaruh Kebijakan Rasionalisasi Anggaran Terhadap Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2020.
- Instruksi, “Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nomor: 02/IN/M/2020. 2020. Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi”, 2020.
- Keputusan Bersama, “Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Nomor: 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020. 2020. Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional”, 2020.
- Kumparan.com. (2020, 13 Mei) Pemkot Surabaya Siapkan Dua Rumah Sakit Karantina Untuk Pasien Covid-19 Ringan. Diakses pada 1 Desember 2021, dari <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/pemkot-surabaya-siapakan-dua-rumah-sakit-karantina-untuk-pasien-covid-19-ringan-1tPGJabR27P/full>
- Liputan6.com. (2020, 30 Maret) Pekerja Konstruksi Tetap Dibayar Meski Proyek Infrastruktur Berhenti Akibat Corona. Diakses pada 28 Mei 2020, pada <https://liputan6.com/bisnis/read/4214324/pekerja-konstruksi-tetap-dibayar-meski-proyek-infrastruktur-berhenti-akibat-corona>
- Nugroho, R.D. 2009. Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi). Jakarta: Gramedia.
- Putra, I Made Sinar Dewata dkk. (2017) ANALISIS RASIONALISASI ANGGARAN DAN DAMPAK ADANYA RASIONALISASI ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 7 No. 1, April 2017.
- Surabaya.tribunnews.com. (2020, 29 Januari). Ini Program Prioritas Pemkot Surabaya, Arah Pembangunan di Tahun 2020. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari <https://surabaya.tribunnews.com/2020/01/29/ini-program-prioritas-pemkot-surabaya-arrah-pembangunan-di-tahun-2020>
- Surabaya.tribunnews.com. (2020, 14 April). Kemendagri: Masa Realokasi APBD Diperpanjang,
-

- Anggaran Covid-19 Masih Bisa Diperbesar. Diakses pada 30 Oktober 2021 dari <https://surabaya.tribunnews.com/2020/04/14/kemendagri-masa-realokasi-apbd-diperpanjang-anggaran-penanganan-covid-19-masih-bisa-diperbesar>
- Surabaya.kompas.com. (2020, 20 April). Pemkot Surabaya Anggarkan Rp 196 Miliar untuk Tangani Covid-19. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari <https://surabaya.kompas.com/read/2020/04/20/05214771/pemkot-surabaya-anggarkan-rp-196-miliar-untuk-tangani-covid-19?page=all>
- Surabaya.liputan6.com. (2021, 20 Juli) Surabaya Butuh Anggaran Rp 446 Miliar Tangani Covid-19 Juli hingga Desember. Diakses pada 1 Desember 2021, dari <https://surabaya.liputan6.com/read/4611058/surabaya-butuh-anggaran-rp-446-miliar-tangani-covid-19-juli-hingga-desember>
- JawaPos.com. (2021, 20 September). Persentase Vaksinasi Covid-19 di Surabaya Tembus 104,8 Persen. Diakses pada 1 Desember 2021, dari <https://www.jawapos.com/surabaya/20/09/2021/persentase-vaksinasi-covid-19-di-surabaya-tembus-1048-persen/>
-